

**PENGARUH MORALITAS, MOTIVASI DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada SKPD di Kota Solok)**

SKRIPSI



OLEH :

GUSNARDI KURNIAWAN

00385/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Judul : Pengaruh Moralitas, Motivasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)

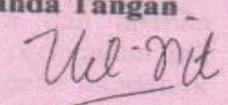
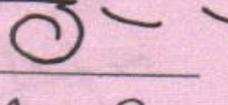
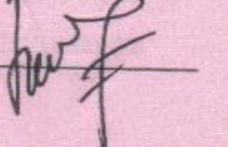
Nama : Gusnardi Kurniawan

BP/NIM : 2008/00385

Fakultas : Ekonomi

Padang, 1 Agustus 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	2. 
3. Anggota	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	4. 

ABSTRAK

Gusnardi Kurniawan (2008/0035) Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok.

Pembimbing I : Nelvirita SE M.Si Ak
Pembimbing II : Erly Mulyani SE M.Si Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh moralitas aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. 2) Pengaruh motivasi negatif aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. 3) Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kota Solok. Pengambilan sampel secara *total sampling*, dengan responden kepala dan staf akuntansi SKPD. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) Moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,680 < 2,2075$ (sig $0,009 < \alpha 0,05$) yang berarti H_1 diterima. 2) Motivasi negatif berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,016 > 2,2075$ (sig $0,004 < \alpha 0,05$) yang berarti H_2 diterima. 3) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-3,369 < 2,2075$ (sig $0,001 < \alpha 0,05$) yang berarti H_3 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi seluruh instansi pemerintah agar moral/kepribadian yang bagus dapat di terapkan pada instansinya maka pedoman dalam berperilaku sesuai dengan peraturan harus ditegakkan sehingga untuk melakukan kecurangan dalam instansi tersebut bisa dicegah, aset milik pemerintah ditertibkan lagi penggunaannya agar motivasi negatif/dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan dapat dicegah, dengan menerapkan tingkat kompetensi dan menciptakan kepemimpinan yang kondusif serta pengawasan yang terus menerus dan periodik dalam menilai kualitas pengendalian intern maka kecurangan juga dapat dicegah. Pada intinya untuk mencegah kecurangan tidak terjadi di instansi pemerintah sebaiknya dimulai sejak menerima seseorang (*recruitment process*) sebagai pegawai yang dilakukan melalui seleksi yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 2) Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah variabel penelitian seperti kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi dan variabel-variabel lainnya yang mungkin berpengaruh kuat dengan kecurangan dalam laporan keuangan serta mengurangi pernyataan negatif karena responden kurang bisa menjawab dengan tepat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Ibu Nelvirita SE, MSi, Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Erly Mulyani, SE, MSi, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ayah dan ibu, kakak beserta adik-adik dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.

6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, 1 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Teori	12
1. Definisi Kecurangan	12
a. Jenis-Jenis Kecurangan	14
b. Faktor-Kaktor Kecurangan	17
c. Kecurangan dalam Laporan Keuangan	22
2. Moralitas	23
3. Motivasi.....	25
4. Sistem Pengendalian Intern	28
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Hubungan Antar Variabel Penelitian	37

D. Rerangka Konseptual	41
E. Hipotesis	43
BAB III. METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Populasi dan Sampel	44
C. Jenis Data dan Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Variabel Penelitian	47
F. Instrumen Penelitian	48
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	51
H. Hasil Uji Coba Instrumen.....	53
I. Uji Asumsi Klasik	54
J. Teknik Analisis Data	56
K. Definisi Operasional	61
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	63
B. Demografi Responden	64
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	67
D. Statistik deskriptif	75
E. Uji Validitas dan Reliabilitas	75
F. Uji Asumsi Klasik	77
G. Hasil Penelitian	80
H. Pembahasan	87

BAB V. PENUTUP	94
A.....Kesimpulan	
.....	94
B.....Keterbatasan	
.....	95
C.....Saran	
.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam dunia pemerintahan yang dilandasi oleh nuansa politik telah mempengaruhi pimpinan pemerintah melakukan kecurangan (*fraud*). Banyak pemicu seseorang untuk melakukan kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Kecurangan dapat kita lihat dari penyajian laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan fakta dan bersifat material yang diketahui tidak benar dan dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menipu maka dapat dikatakan sebagai kecurangan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan serta menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah harus disajikan secara relevan dan reliabel serta perlu pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Kecurangan pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arens (2008), yang menyatakan bahwa kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk

mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), ada 3 bentuk kecurangan yang diistilahkan dengan *fraud tree*, yaitu *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (pengambilan aset secara ilegal), dan *fraudulent statements* (pernyataan palsu atau salah pernyataan). Dari tiga bentuk kecurangan tersebut di atas maka pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE* terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), *exposure* (pengungkapan). *Greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan *opportunity* dan *exposure* berhubungan dengan organisasi sebagai korban pembuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). Faktor individual berhubungan dengan perilaku yang melekat pada individu itu sendiri. Dalam kaitannya dengan faktor individu tersebut akan berkaitan dengan moral dan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Sedangkan faktor generik akan berhubungan dengan organisasi yang berbuat kecurangan.

Menurut Bertens (1993), moralitas berasal dari kata sifat latin “*moralis*” mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral. Moralitas suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *greed* (keserakahan). Menurutnya semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul dan datang karena prilaku buruk dari seseorang tersebut yaitu berupa keserakahan yang ada dalam dirinya.

Menurut Amrizal (2004), dalam suatu organisasi perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan salah tersebut bahkan dipandang sudah

hal yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral akan menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya akan merusak bahkan dapat menghancurkan organisasi.

Menurut Kartono (2002), motivasi berasal dari kata Latin "*motivius*" artinya sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Menurut Siagian (2004), sasaran dari teori motivasi adalah pemuas kebutuhan yang bersifat primer. Motivasi untuk berbuat kecurangan berhubungan dengan motivasi negatif. Motivasi negatif adalah perilaku yang berangkat dari pengutamaan kepentingan-kepentingan pribadi, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan kelompok atau kepentingan organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh motivasi yaitu *need* (kebutuhan). Setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Tuanakotta (2007), dari bentuk kecurangan pengambilan aset secara ilegal (*asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*larceny*) yaitu bentuk penjarahan yang dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of asset*).

Sedangkan menurut teori *GONE*, faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi yaitu adanya *opportunity* (kesempatan). Kecurangan umumnya didorong oleh adanya kesempatan. Kesempatan tersebut muncul karena lemahnya pengawasan, seperti tidak adanya otorisasi untuk setiap transaksi dalam pembelian, sehingga bagian pembelian bisa saja melakukan kecurangan dengan menggelapkan jumlah pembelian, atau melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan (*exposure*) kecurangan yang telah terjadi, maka hal ini akan semakin mendorong seseorang untuk bisa melakukan kecurangan yang sama.

Kasus kecurangan yang ditemui BPK setelah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok untuk tahun anggaran (TA) 2009 diantaranya yaitu terdapat uang daerah Pemerintah Kota Solok yang dikelola/disimpan oleh bendahara dan pihak lain yang belum termasuk dalam *bank statement* maupun sisa kas Pemerintah Kota Solok per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 4.565.750.600,00, sehingga diduga menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk memanfaatkan uang APBD di luar mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah (BPK RI). Potensi penyalahgunaan dana APBD di luar mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah oleh pihak tertentu pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai tindakan kecurangan (www.bpk.com).

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok untuk tahun anggaran 2009 ditemukan masalah-masalah material yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yaitu pengelolaan aset daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok belum tertib dan nilai aset tetap yang disajikan di neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.588.700.492.253,50 tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum dicatat berdasarkan prosedur akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan (www.bpk.com).

Selanjutnya dalam kasus terjadinya *disclaimer* terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok menandakan bahwa Pemerintah Kota Solok harus memberikan perhatian khusus terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2009 dan pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terlibat dalam kasus penyimpangan atau penyalahgunaan jabatan harus diberhentikan dari jabatannya. Semua ini bisa terjadi karena administrasi yang belum sesuai dengan peraturan, lemahnya sistem pengendalian internal dan Pemerintah Kota Solok yang tidak memberikan tindak lanjut terhadap tanggapan berbagai pihak. Seharusnya walikota dapat mengoptimalkan fungsi Inspektorat Kota Solok (BAWASDA), sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah dan memperbanyak tenaga-tenaga dengan kualifikasi pendidikan akuntansi untuk menyusun sistem akuntansi keuangan daerah.

Perlunya upaya perbaikan sistem pengendalian internal oleh Pemerintah Kota Solok adalah sesuai dengan berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli. Menurut Wilopo (2006), kecurangan dapat disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Jika suatu pengendalian intern lemah maka akan mengakibatkan kekayaan atau aset suatu negara yang dikelola pemerintah daerah tidak terjamin keamanannya, informasi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional serta tidak dapat dipatuhinya kebijakan kepala daerah dan perundang-undangan yang ditetapkan.

Hasil penelitian oleh Wilopo (2006), menemukan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan. Sedangkan kesesuaian kompensasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai pada perusahaan BUMN di Indonesia tidak secara signifikan menurunkan kecurangan akuntansi dari manajemen perusahaan. Moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan, hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas manajemen pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Aviora (2005), menunjukkan bahwa motivasi negatif berpengaruh secara signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi negatif seseorang untuk berbuat kecurangan, maka semakin tinggi juga tingkat kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wilopo (2006) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan BUMN di Indonesia”. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian Wilopo yaitu: keefektifan pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, serta moralitas manajemen. Namun penelitian masih sangat perlu dilakukan melihat kasus kecurangan yang masih terjadi di kota Solok. Jika kita lihat sistem pengendalian intern yang seharusnya dapat meminimumkan terjadinya kecurangan tidak terlaksana dengan baik dan banyaknya moralitas yang masih kurang dikalangan pemerintah kota Solok, dimana dari kasus pada pemerintah Solok terjadi penyalahgunaan dana APBN yang tidak sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban.

Menurut teori *GONE* (*greed, opportunity, need* dan *exposure*) merupakan faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan (*fraud*). Dimana faktor *greed* (keserakahan) dan *need* (kebutuhan) berhubungan dengan individu pelaku kecurangan yang melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori yaitu moral berhubungan dengan keserakahan (*greed*) dan motivasi berhubungan dengan kebutuhan (*need*). Sedangkan faktor *opportunity* (kesempatan) dan *exposure* (pengungkapan) berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian intern.

Selain itu penelitian dilakukan pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Solok, sedangkan Wilopo meneliti di Perusahaan Publik dan BUMN di Indonesia. Perbedaan ini bertujuan untuk melihat apakah moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengurangi tindakan kecurangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Aparatur Pemerintah Terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk kecurangan dalam laporan keuangan?
2. Apa saja faktor-faktor kecurangan dalam laporan keuangan?
3. Apa saja tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi kecurangan dalam laporan keuangan?
4. Seberapa besar moralitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?
5. Seberapa besar motivasi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?
6. Seberapa besar sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan seberapa besar moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah mempengaruhi tingkat kecurangan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Solok.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh moralitas aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan?
2. Seberapa besar pengaruh motivasi aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan?
3. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh moralitas aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.
2. Pengaruh motivasi aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.
3. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademis, penelitian ini untuk mendalami dan memperluas pengetahuan tentang pengaruh moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Bagi pengguna laporan keuangan pemerintah, penelitian ini untuk menambah dan memberikan gambaran pengetahuan mengenai kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga tidak salah dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan.

3. Bagi peneliti, dapat mengetahui dan menambah wawasan tentang tingkat kecurangan dalam laporan keuangan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern.
4. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang memadai dalam melakukan dan melanjutkan penelitian yang sejenis dan memperluas penelitian ini dengan menambah atau mengkombinasikan variabel-variabel penelitian untuk mencapai hasil yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kecurangan

a. Definisi Kecurangan

Menurut Arens (2008), kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2003), tindak kecurangan (*fraud*) dapat didefinisikan sebagai suatu salah saji dari suatu fakta yang bersifat material yang diketahui tidak benar atau dilakukan dengan sengaja, dengan maksud menipu terhadap pihak lain yang mengakibatkan pihak lain dirugikan.

Menurut Sawyer (2006), kecurangan (*fraud*) adalah melakukan kejahatan dengan penipuan. Banyak istilah dari kecurangan, dapat disebut kecurangan (*fraud*), kejahatan kerah putih (*white color crime*) dan penggelapan (*embezzlement*).

- 1) Kecurangan adalah meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun di dalam organisasi.
- 2) Kejahatan kerah putih adalah tindakan yang dilakukan dengan cara nonfisik melalui penyembunyian/penipuan untuk mendapatkan uang/harta benda, untuk menghindari pembayaran, untuk mendapatkan¹² keuntungan bisnis/pribadi.
- 3) Penggelapan adalah konversi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, harta benda yang secara sah berada di bawah pengawasan pelaku kejahatan. Penggelapan tidak meliputi

tindakan-tindakan kriminal seperti penyuapan, pencurian, kecurangan terhadap pemerintah, memperoleh harta benda melalui ancaman kekerasan.

Menurut Tuanakotta (2007), dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti Pasal 378 tentang perbuatan curang: (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”).

Menurut Suhermadi (2006), mendefinisikan *fraud* sebagai suatu tindakan kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *fraud* adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Penggelapan adalah merubah aset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar adalah untuk kepentingan dirinya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukannya adalah untuk menyembunyikan, menutupi atau dengan cara tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di bidang keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang lain.

b. Jenis-Jenis Kecurangan

Menurut Tuanakotta (2007), *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2004) adalah salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengategorikan kecurangan dalam 3 kelompok sebagai berikut:

- 1) Korupsi (*corruption*)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukan pengertian korupsi menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut ACFE korupsi terbagi dalam:

- a) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yaitu pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif suatu organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam 3 kategori yaitu rencana penjualan, rencana pembelian, dan rencana lainnya.
 - b) Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan/ permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
 - c) Pemberian ilegal (*illegal gravity*). Pemberian ilegal hampir sama dengan suap, tetapi pemberian ilegal ini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh akan diberi hadiah yang mahal atas pengaruh yang dia berikan dalam negosiasi/kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.
 - d) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomi lawan dari suap (*bribery fraud*). Penjual menawarkan untuk memberi suap/hadiah pada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.
- 2) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Penyalahgunaan aset/harta perusahaan atau organisasi adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam:

- a) Kecurangan kas (*cash fraud*), yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.
 - b) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*) adalah kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya.
- 3) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*)

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori:

- a) *Timing difference (improper treatment of sales)*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda/lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi yang sebenarnya.
- b) *Fictitious revenues*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (*fictive*).
- c) *Concealed liabilities and expenses*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan perusahaan terlihat bagus.
- d) *Improper disclosure*, yaitu perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan.

- e) *Improper asset valuation*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang wajar/tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

c. Faktor-Faktor Kecurangan

Menurut Singleton (2006), terdapat 3 faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan sebutan “*fraud triagle*”, sebagai berikut:

1) *Pressure* (tekanan)

Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya adanya tekanan karena dia memiliki utang atau tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya di perusahaan. Karyawan perusahaan yang diharapkan dengan hilangnya penjualan, kompetisi yang kuat, *schedule* atau spesifikasi yang berat, peraturan-peraturan yang keras atau laba yang menurun, mungkin melakukan hal-hal yang ilegal atau tidak etis untuk membalik posisi mereka atau perusahaan.

2) *Opportunity* (kesempatan)

Kecurangan dapat terjadi jika ada kesempatan untuk melakukan kecurangan perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki pengendalian intern yang efektif, kesempatan untuk melakukan kecurangan terbuka lebar. Tetapi dengan pengendalian intern yang memadai akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan atau godaan para pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya, jika aset dibiarkan tanpa pengawas, karyawan dapat beralasan bahwa kondisi memang memungkinkan untuk melakukan kecurangan terhadap aset.

3) *Rationalization*

Para pelaku kecurangan menganggap bahwa kecurangan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka melakukan kecurangan dan mereka beranggapan

bahwa mereka hanya mengambil sedikit atau meminjam harta perusahaan dan tidak akan merugikan perusahaan.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam *GONE theory* menyebutkan bahwa kecurangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1) *Greed* (keserakahan)

Menurutnya semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang.

2) *Opportunity* (kesempatan)

Setiap orang yang berada dalam organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan umumnya didorong oleh adanya kesempatan, karena tanpa adanya kesempatan kecurangan tidak bisa terjadi. Kesempatan tersebut muncul antara lain disebabkan oleh lemahnya pengawasan dalam perusahaan, seperti tidak adanya otorisasi untuk setiap transaksi dalam pembelian, sehingga bagian pembelian bisa saja melakukan kecurangan dengan menggelapkan jumlah pembelian, atau melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3) *Need* (kebutuhan)

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan. Setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya melakukan kecurangan sekalipun. Karena adanya kebutuhan dan kesempatan maka kecurangan dapat terjadi.

4) *Exposure* (pengungkapan)

Karena tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan kecurangan yang telah terjadi, maka hal ini akan semakin mendorong seseorang untuk bisa melakukan kecurangan yang sama.

Menurut Tuanakotta (2007), ada ungkapan yang secara mudah menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu adalah: *fraud by need, by greed, and by opportunity*. Namun ada makna dari ungkapan itu. Kalau ingin mencengah *fraud*, hilangkan atau tekan sedapat mungkin penyebab. Menghilangkan atau menekan *need* dan *greed* yang mengawali terjadinya *fraud* dilakukan sejak menerima seseorang (*recruitment process*). Sedangkan unsur *by opportunity* dalam ungkapan tersebut biasanya ditekan melalui pengendalian intern.

Menurut Koletar (2003), KPMG (Klynveld, Peat, Mawick, Goerdeler) *in their 1998 Fraud Survey, is reported to have concluded that the following factor seem to be causes or indicators of employee fraud:*

- b. *Personal financial pressure*
- c. *Substance abuse*
- d. *Gambling*
- e. *Real or imagined grievances*
- f. *Ongoing transactions with related parties*
- g. *Increased stress*
- h. *Internal pressure to meet deadlines or budgets*
- i. *Short vacations*
- j. *Unusual hours*

Menurut survei oleh KPMG pada tahun 1998 tentang kecurangan, faktor penyebab atau indikator kecurangan yang dilakukan oleh pimpinan maupun bawahan dapat disebabkan karena:

- 1) Tekanan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Adanya penyalahgunaan jabatan
- 3) Kebiasaan berjudi

- 4) Membayangkan hidup mewah
- 5) Kejadiannya selalu berulang-ulang
- 6) Stres yang berlebihan karena tuntutan hidup
- 7) Tekanan dalam memenuhi batas waktu anggaran
- 8) Hari berlibur yang pendek
- 9) Jam kerja yang tidak biasa

Faktor-faktor di atas tidak terlepas dari moral dan motivasi dari seseorang sehingga dia melakukan kecurangan. Moralitas yaitu suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Dari 9 faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG yang menjadi penyebab kecurangan yang terkait dengan moral seseorang yaitu menyalahgunakan jabatan, kebiasaan berjudi.

Sedangkan motivasi artinya sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Dari 9 faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG yang menjadi penyebab kecurangan yang terkait dengan motivasi yaitu adanya tekanan dalam diri seseorang untuk memenuhi keuangannya dan selalu membayangkan hidup mewah.

Selain dari faktor-faktor di atas, Tuanakotta (2007), dari bentuk kecurangan “pengambilan” aset secara ilegal (*asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*larceny*) yaitu bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*).

d. Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Menurut Undang-Undang (UU) No 24 tahun 2006, dijelaskan bahwa kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah

saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (seringkali disebut penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aset entitas yang berkaitan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut William (1996), kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) terdiri dari tindakan-tindakan seperti:

- 1) Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan.
- 2) Representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan.
- 3) Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa kecurangan dalam laporan keuangan terdiri dari tindakan manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan secara sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, dan terdapatnya salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi.

Menurut Taylor (1997), memberikan definisi dari kecurangan pelaporan keuangan yaitu kegiatan yang disengaja atau nekat, apakah berupa kegiatan atau penghapusan yang menghasilkan kesalahan pernyataan keuangan sehingga terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Menurut Schilit (1993), mengidentifikasi tujuh kategori besar istilah lain kecurangan pelaporan keuangan antara lain merekam penghasilan sebelum didapatkan, membuat pendapatan fiktif, membesarkan keuntungan dengan transaksi yang tidak terjadi, mengganti pengeluaran saat ini dengan periode sebelumnya, tidak merekam atau menyingkap kebenaran, mengganti pendapatan terbaru dengan periode sebelumnya, mengganti pengeluaran masa yang akan datang dengan periode sebelumnya.

2. Moralitas

Menurut Bertens (1993), moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Menurut Salam (2002), moral berasal dari kata latin *mores*. *Mores* berasal dari kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Berarti moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan, yang memuat ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Jadi, perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Penilaian itu menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Menurut Budiningsih (2004), moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Menurut Amrizal (2004), peranan moral/kepribadian yang baik dari seorang pimpinan dan komitmennya yang kuat sangat mendorong tegaknya suatu etika perilaku dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh pegawai. Pimpinan tidak bisa menginginkan suatu etika dan perilaku yang tinggi dari suatu organisasi sementara pimpinan itu sendiri tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Dalam suatu organisasi, terutama unit organisasi yang besar dari manajemen sangat dibutuhkan dua hal yaitu komitmen moral dan keterbukaan dalam komunikasi.

Menurut Amrizal (2004), dalam suatu organisasi perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan salah tersebut bahkan dipandang sudah hal yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat.

Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral akan menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya akan merusak bahkan dapat menghancurkan organisasi.

Menurut Cressey dalam Tuanakotta (2007), untuk meneliti para pegawai yang mencuri uang perusahaan (*embezzlers*) yang merupakan perbuatan kecurangan, ia mewawancarai 200 orang yang dipenjara karena *fraud*. Cressey menemukan bahwa adanya *violation of ascribed obligation*, artinya melanggar suatu pedoman kerja atau lebih dikenal juga dengan penyalahgunaan jabatan merupakan salah satu perbuatan kecurangan yang disebabkan oleh moral seseorang.

Sedangkan menurut Simanjuntak (2008), dalam *GONE theory* menyebutkan bahwa kecurangan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu :

1) *Greed* (keserakahan)

Keserakahan berhubungan dengan moral seseorang. Menurutny semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang.

2) Berperilaku etis

Menurut survey KPMG dalam Koletar (2003), faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan adalah menyalahgunakan jabatan dan adanya kebiasaan berjudi yang berkaitan dengan buruknya moral seseorang.

3. Motivasi

Istilah motivasi (*motivation*) berasal dari perkataan bahasa latin, yakni *movere*, yang berarti “menggerakkan” (*to move*). Ada berbagai rumusan untuk istilah motivasi, seperti diungkapkan Mitchell dalam Winardi (2001),

“...motivasi mewakili proses psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (*volunter*) yang diarahkan kearah tujuan tertentu”.

Chung dalam Gomes (2003), menyatakan bahwa “*motivation is defined as goal-directed behavior. It concern the level of effort one exerts in pursuing a goal*”. Motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan untuk mengejar suatu tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) mendefinisikan motivasi sebagai:

“ motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau motivasi adalah usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya”.

Menurut Kartono (2002), motivasi (dari kata latin, *motivius*) artinya sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Winardi (2001), mendefinisikan motivasi seseorang itu bersumber dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Motivasi dari dalam diri (intrinsik) yaitu keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong yang murni berasal dari dalam diri individu. Motivasi dari luar (ekstrinsik) yaitu keinginan untuk bertingkah laku sebagai akibat adanya rangsangan dari luar.

Menurut Siagian (2004), salah satu sasaran teori motivasi adalah pemuas kebutuhan manusia termasuk kebutuhan yang bersifat primer. Dilihat dari kaca mata manajemen, motivasi para anggota organisasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu motivasi positif dan motivasi negatif.

Motivasi positif adalah perilaku yang mendorong tercapainya tujuan dan berbagai sasaran organisasi dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktifitas yang tinggi. Motivasi negatif adalah perilaku yang berangkat dari pengutamaan kepentingan-kepentingan pribadi, kalau perlu

dengan mengorbankan kepentingan kelompok atau kepentingan organisasi secara keseluruhan. Persepsi yang mengutamakan kepentingan pribadi mempunyai dampak negatif yang lebih kuat lagi apabila para anggota organisasi tidak memiliki tingkat keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas masing-masing. Dengan kata lain, pada dasarnya motivasi negatif timbul karena dua hal. Pertama, karena sikap dan tindak tanduk yang diarahkan kepada kepentingan diri sendiri. Kedua, karena faktor-faktor ketidakmampuan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang.

Menurut Tuanakotta (2007), salah satu pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan adalah karena *pressure* (tekanan). Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya adanya tekanan karena dia memiliki utang/tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya dalam organisasi tempat mereka bekerja.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh motivasi yang negatif yaitu:

1) *Need* (kebutuhan)

Setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun.

2) *Pressure* (tekanan)

Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya adanya tekanan karena dia memiliki utang atau tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya di perusahaan. Karyawan perusahaan yang diharapkan dengan hilangnya penjualan, kompetisi yang kuat, *schedule* atau spesifikasi yang berat, peraturan-

peraturan yang keras atau laba yang menurun, mungkin melakukan hal-hal yang ilegal atau tidak etis untuk membalik posisi mereka atau perusahaan.

Sedangkan menurut Koletar (2003), menyebutkan bahwa faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG yang menjadi penyebab kecurangan yang terkait dengan motivasi yaitu adanya tekanan dalam diri seseorang untuk memenuhi keuangannya dan membayangkan hidup mewah. Jadi, motivasi disini berkaitan dengan tekanan (*pressure*) dalam diri seseorang (karena memiliki utang), kebutuhan (*need*) atas materi/uang atau keinginan untuk hidup mewah yang dapat mempengaruhi tingkat melakukan kecurangan.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lima elemen, yaitu:

1) Lingkungan pengendalian

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- 2) Penilaian risiko

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3) Kegiatan pengendalian

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4) Informasi dan komunikasi

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5) Pemantauan pengendalian intern

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Menurut Bastian (2003), pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas dan segenap personil) yang mendesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan sebagai berikut:

- a. Keandalan laporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

Amrizal (2004), menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah timbulnya kecurangan adalah dengan merancang sebuah sistem yang dilengkapi dengan *intern control* yang cukup memadai sehingga kecurangan sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan terhindar dari kecurangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tentunya akan lebih akurat dan lebih menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga tidak menyesatkan para penggunanya dalam pengambilan keputusan.

Menurut Koletar (2003), *control are, in many ways, the bedrock infrastructure of the organization's defensive system against fraud and other types of business risk. They have been decribed in this role as follows: Internal controls are the first line of defense againts fraud within any organization. A comprehensive, fully implemented, and regularly monitored system of controls is essential to the prevention and detection of losses that arise from fraud. Internal auditors who understand the various types of faud and their relative rates of occurance will be more likely to recognize any red flags and be better prepared to fight the high organizational cost of corruption.*

Salah satu cara untuk mengontrol kecurangan maupun kerugian dalam bisnis, adalah dengan membangun suatu sistem pengendalian intern. Tujuan dari pengendalian intern tersebut adalah sebagai pertahanan pertama untuk melawan kecurangan dalam organisasi. Hal ini perlu diterapkan untuk memonitor sistem kendali untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Pengendalian intern memahami berbagai jenis kecurangan yang akan dilakukan oleh organisasi, dan juga untuk mendeteksi terjadinya korupsi.

Menurut Amrizal (2004), cara yang digunakan manajemen dalam mengefektifkan aktivitas pengendalian intern adalah:

1) Mereview kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atau hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan keuangan.

2) Pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

3) Pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aset, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aset dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data *file*, dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

4) Pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aset ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

Menurut Wilopo (2006), jika suatu sistem pengendalian intern lemah maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan. Dengan adanya pengendalian wewenang oleh pemilik kepada pengelola, maka fungsi pengendalian semakin bertambah penting. Hal ini untuk menentukan apakah tugas dan wewenang yang didelegasikan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Proses pengendalian intern tersebut dilakukan oleh pihak manajemen yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengamankan harta perusahaan.

Menurut Tuanakotta (2007), dari bentuk kecurangan pengambilan aset secara ilegal (*asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*larceny*), yaitu bentuk penjarahan yang dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*). Menurut Koletar

(2003), menyebutkan bahwa faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG kejadiannya selalu berulang-ulang.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE* faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi yaitu adanya *opportunity* (kesempatan). Kecurangan umumnya didorong oleh adanya kesempatan. Kesempatan tersebut muncul karena lemahnya pengawasan, seperti tidak adanya otorisasi untuk setiap transaksi dalam pembelian, sehingga bagian pembelian bisa saja melakukan kecurangan dengan menggelapkan jumlah pembelian, atau melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Serta karena tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan (*exposure*) kecurangan yang telah terjadi, maka hal ini akan semakin mendorong seseorang untuk bisa melakukan kecurangan yang sama.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian Wilopo (2006), mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian internal di perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan. Sedangkan moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi atau semakin tinggi tahapan moralitas manajemen semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadi.

Wiliya (2010) juga meneliti mengenai pengaruh moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa moralitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang, motivasi negatif dari aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang, dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang.

Lebih lanjut, hasil penelitian Aviora (2005), yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian intern pada perusahaan maka akan mengurangi kecurangan pelaporan keuangan. Karena dengan efektifnya pengendalian intern dapat mendorong pihak manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kecurangan pada pelaporan keuangan. Sedangkan motivasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi negatif seseorang untuk berbuat kecurangan, maka semakin tinggi juga tingkat kecurangan pelaporan keuangan.

Selanjutnya moralitas manajemen berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini berarti bahwa moralitas manajemen berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi di perusahaan. Moralitas yang tinggi yang dimiliki oleh seorang manajer mampu untuk menghindari manajer melakukan kecurangan pelaporan keuangan, karena

seorang manajer bertindak untuk lebih mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, dan motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam pelaporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

C. Hubungan Antar Variabel Penelitian

1. Moralitas terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Menurut Bertens (1993), moralitas berasal dari kata sifat latin “moralis” mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Moralitas yaitu suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi atau semakin tinggi tahapan moralitas manajemen semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadi.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *greed* (keserakahan). Keserakahan merupakan bentuk moral seseorang yang jelek. Semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang.

Selain itu, menurut Koletar (2003), penyalahgunaan jabatan merupakan prilaku/moral yang tidak sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak

tertulis dan adanya kebiasaan berjudi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan seseorang, dimana faktor ini secara langsung berkaitan dengan moral (perbuatan).

2. Motivasi terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Menurut Kartono (2002), motivasi (dari kata latin, *motivius*) artinya sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), mendefinisikan motivasi sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau motivasi adalah usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Berdasarkan penelitian Aviora (2005), menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi negatif seseorang untuk berbuat kecurangan, maka semakin tinggi juga tingkat kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Menurut Siagian (2004), salah satu sasaran teori motivasi adalah pemuas kebutuhan manusia termasuk kebutuhan yang bersifat primer. Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE*, motivasi/dorongan seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh adanya *need* (kebutuhan). Setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun. Karena adanya kebutuhan dari diri seseorang tersebut maka akan memotivasi atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kecurangan.

Menurut Tuanakotta (2007), salah satu pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan adalah karena *pressure* (tekanan). Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku

kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya adanya tekanan karena dia memiliki utang/tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya dalam organisasi tempat mereka bekerja. Sedangkan menurut Koletar (2003), menyebutkan bahwa faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG yang menjadi penyebab kecurangan yang terkait dengan motivasi yaitu adanya tekanan dalam diri seseorang untuk memenuhi keuangannya dan selalu membayangkan hidup mewah.

3. Sistem Pengendalian Intern terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern menurut Bastian (2003), merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas dan segenap personil) yang mendesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan sebagai berikut:

- 1) Keandalan laporan keuangan
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- 3) Efektivitas dan efisiensi operasi

Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian intern yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian intern di perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut Tuanakotta (2007), dari bentuk kecurangan pengambilan aset secara ilegal (*asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*larceny*), yaitu bentuk penjarahan yang dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*). Menurut Koletar

(2003), menyebutkan bahwa faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG kejadiannya selalu berulang-ulang.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE* faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi yaitu adanya *opportunity* (kesempatan). Kecurangan umumnya didorong oleh adanya kesempatan. Kesempatan tersebut muncul karena lemahnya pengawasan, seperti tidak adanya otorisasi untuk setiap transaksi dalam pembelian, sehingga bagian pembelian bisa saja melakukan kecurangan dengan menggelapkan jumlah pembelian, atau melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Serta karena tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan kecurangan yang telah terjadi, maka hal ini akan semakin mendorong seseorang untuk bisa melakukan kecurangan yang sama.

D. Kerangka Konseptual

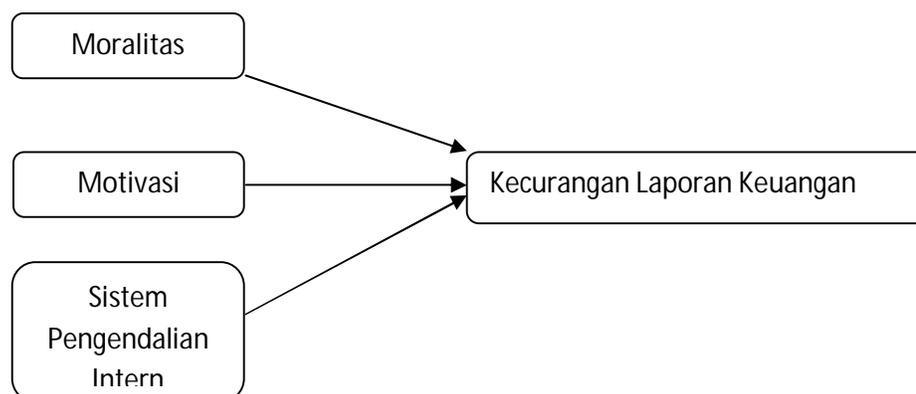
Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dari kajian teori yang telah dikemukakan di atas. Dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Solok.

Moralitas dari aparatur pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan (tidak berperilaku sesuai dengan pedomannya) dan keserakahannya (*greed*) merupakan faktor pemicu kecurangan (*fraud*).

Motivasi dari aparatur pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Seseorang melakukan kecurangan ditimbulkan karena adanya tekanan (*pressure*) dalam diri seseorang (memiliki utang) dan adanya kebutuhan (*need*).

Lemahnya sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi kecurangan dalam laporan keuangan. Jika suatu sistem pengendalian intern lemah maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipenuhinya kebijaksanaan pimpinan yang ditetapkan. Dengan adanya pengendalian wewenang oleh pimpinan kepada pegawainya, maka fungsi pengendalian semakin bertambah penting. Hal ini untuk menentukan apakah tugas dan wewenang yang didelegasikan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Bertitik tolak pada kajian di atas, maka untuk lebih jelasnya variabel-variabel yang menjadi objek pengujian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas dan didukung dengan kajian teori, maka dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Moralitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan dalam laporan keuangan.

H2 : Motivasi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

H3 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan dalam laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan kausatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian variabel-variabel yang diteliti, dan juga untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana data yang digunakan dalam bentuk angka. Menurut Indriantoro (1999), penelitian kausatif adalah tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah mempengaruhi tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

B. Populasi dan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, populasi menurut Sugiyono (2008) adalah kumpulan dari seluruh elemen yang sejenis yang dapat dibedakan satu sama lainnya, disebabkan karena adanya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Moralitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.
2. Motivasi negatif dari aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.
3. Sistem pengendalian intern aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 28%. Sedangkan 72% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruh dari kecurangan dalam laporan keuangan

99

2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa moralitas yang baik/bagus dari aparaturnya pemerintah perlu ditingkatkan, sedangkan motivasi negatif dari aparaturnya pemerintah untuk melakukan kecurangan perlu dikurangkan dan sistem pengendalian intern dalam instansi perlu dikuatkan agar tingkat kecurangan bisa diminimalkan. Untuk mencegah kecurangan terjadi di instansi, sebaiknya dimulai sejak menerima seseorang (*recruitment process*) yang dilakukan melalui seleksi yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga pegawai yang diangkat/diambil benar-benar yang berkompeten di bidangnya.
2. Penelitian ini masih terbatas pada moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparaturnya pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah variabel penelitian seperti kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi dan variabel-variabel lainnya yang mungkin berpengaruh kuat dengan kecurangan dalam laporan keuangan.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu dimana kepala SKPD belum sepenuhnya mengerti tentang pentingnya pengendalian intern untuk menurunkan tingkat kecurangan, namun jawaban dari kepala SKPD telah mampu menerapkan pengendalian intern. Jadi dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, maka untuk penelitian selanjutnya selain menggunakan kuesioner dilakukan interview/bertanya langsung ke responden secara tegas dan jelas untuk mendapatkan data/informasi yang benar dan dengan pemaparan kasus pada kuesioner moralitas responden kurang bisa memahami pernyataan negatif dan pernyataan negatif lainnya pada kuesioner kecurangan, sehingga kemungkinan responden menjawab tidak tepat. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih banyak memaparkan pernyataan positif.

d. Variabel Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil uji validitas data penelitian untuk variabel kecurangan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Uji Validitas Kecurangan Laporan Keuangan
Item-Total Statistik

Nomor item kuesioner	Corrected item-Total Correlation (r_{hitung})	$r_{tabel} (n = 30)$	Keterangan
1	.532	.3601	Valid

2	.534	.3601	Valid
3	.585	.3601	Valid
4	.482	.3601	Valid
5	.503	.3601	Valid
6	.532	.3601	Valid
7	.534	.3601	Valid
8	.585	.3601	Valid
9	.482	.3601	Valid
10	.503	.3601	Valid
11	.532	.3601	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013

Walaupun semua item dinyatakan valid pada *pilot test*, data penelitian juga diperlukan uji validitas instrument. Untuk melihat validitas data, dilihat dari *Corrected Item-Total Correlation*, apabila nilainya melebihi dari nilai r table maka data tersebut dikatakan valid. Untuk $n = 30$ didapat $r \text{ table} = 0,3601$. Nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil untuk data yang diolah pada variabel independensi untuk $n = 30$ adalah 0,482 sehingga semua item dinyatakan valid, seperti terlihat pada table 7.

I. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar parameter estimasi tidak bias, yaitu:

1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui model statistik yang akan digunakan. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka akan berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *varians* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut homokedastisitas.

Suatu model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas/terjadinya homokedastisitas, dimana titik-titik dalam gambar *scatter-plot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas (Santoso, 2000:2008).

Dalam pengamatan ini uji heterokedastisitas yang digunakan adalah *glejser-test*.
Persamaan regresinya adalah:

$$|Ut| = \alpha + Bx + \vartheta t$$

Jika profitabilitas signifikan di atas 0,05 dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) dengan kriteria menurut Santoso (2000:218), yaitu:

- 1) Jika angka *tolerance* > 0,10 dan VIF > 10 dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas
- 2) Jika angka *tolerance* < 0,10 dan VIF < 10 dikatakan terdapat gejala multikolinearitas

J. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

1) Verifikasi data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.

2) Menghitung nilai jawaban

- a) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan.
- b) Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus:

$$\underline{5 \text{ SL/SS} + 4 \text{ SR/S} + 3 \text{ KK/RR} + 2 \text{ JR/TS} + 1 \text{ TP/STS}}$$

15

Dimana:

SL/SS = Selalu atau Sangat Setuju

SR/S = Sering atau Setuju

KK/RR = Kadang-Kadang atau Ragu-Ragu

JR/TS = Jarang atau Tidak Setuju

TP/STS = Tidak Pernah atau Sangat Tidak Setuju

- c) Menghitung nilai rerata jawaban responden dengan menggunakan rumus:

$$mean = \frac{\sum_{h=1}^n X_i}{n}$$

Dimana:

X_i = Skor Total

n = Jumlah Responden

i = data ke-1, 2, 3, ..., n

\sum = jumlah

- d) Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel. Dapat dihiung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2004-74):

$$TCR = \frac{R_s}{n} \times 100$$

Dimana:

TCR = Tingkat capaian responden

R_s = Rata-rata skor jawaban responden

n = Nilai skor jawaban

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- Interval jawaban responden 76 – 100 % kategori jawabannya baik.
- Interval jawaban responden 56 – 75 % kategori jawabannya cukup baik.
- Interval jawaban responden < 56% kategori jawabannya kurang baik.

2. Metode Analisis Data

1) Koefisien determinasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya. Pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X yang ada dalam model. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan *adjusted R²*, yaitu:

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - (1 - R^2) \left[\frac{n - 1}{n - k} \right]$$

Dari rumus diatas jelas bahwa:

- a) Jika $k > 1$ maka *adjusted R²* < R^2 , yang berarti bahwa apabila banyaknya variabel bebas ditambah, *adjusted R²* dan R^2 akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan *adjusted R²* lebih kecil dari pada R^2 .
- b) *Adjusted R²* dapat positif atau negatif, walaupun R^2 selalu non-negatif. Jika *adjusted R²* negatif nilainya dianggap nol.

2) Analisis regresi berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Tingkat kecurangan dalam laporan keuangan

a = Konstanta

$b_{1,2,3}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X_1 = Moralitas aparatur pemerintahan

X_2 = Motivasi aparatur pemerintahan

X_3 = Sistem pengendalian intern

e = Epsilon (variabel-variabel independen lain tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain).

3) Uji F (*F-test*)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan:

F = Uji F

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

4) Uji Hipotesis (*t-test*)

Pengujian secara individual, yaitu melihat pengaruh variabel X secara individu terhadap variabel Y. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$t = \frac{b_k}{Sb_k}$$

Keterangan:

t = Nilai mutlak pengujian

b_k = Koefisien regresi masing-masing variabel

Sb_k = Standar error masing-masing variabel

H_1 dan H_3 \longrightarrow $t_{hitung} < t_{tabel}$, $\alpha < 0,05$ diterima

H_2 \longrightarrow $t_{hitung} > t_{tabel}$, $\alpha < 0,05$ diterima

Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05.

K. Definisi Operasional

1. Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan suatu perilaku yang disengaja, baik dengan tindakan atau penghapusan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan.

Kecurangan dalam laporan keuangan sangat merugikan pengguna laporan keuangan. Pengukuran

kecurangan laporan keuangan dalam penelitian ini adalah dilihat dari jenis-jenis kecurangan yang terjadi dalam instansi pemerintahan.

2. Moralitas

Moralitas merupakan suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk pada diri seseorang. Tingkat kecurangan dapat diukur dengan seberapa besar tingkat keserakahan (*greed*) seseorang. Keserakahan ditimbulkan oleh prilaku buruk seorang individu.

3. Motivasi

Motivasi merupakan sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Salah satu sasaran teori motivasi adalah pemuas kebutuhan manusia termasuk kebutuhan yang bersifat primer. Dalam keterkaitan motivasi dengan kecurangan disini adalah adanya motivasi negatif, yaitu perilaku yang berangkat dari pengutamaan kepentingan-kepentingan pribadi, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan kelompok atau kepentingan organisasi secara keseluruhan. Tingkat kecurangan dapat diukur dengan seberapa besar kebutuhan (*need*) seseorang. Setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun.

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk pencapaian keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektifitas operasi serta untuk mencegah kecurangan. Pengukuran pengendalian intern berkaitan dengan elemen pengendalian intern yang sudah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian intern maka akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA).

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal. 2004. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Melalui www.google.com. Diakses tanggal [12 agustus 2011].
- Arens, Alfin A. Randal J. Elder & Mark S. Beasley. 2008. *Auditing & Assurance Services An Integral Approach*. Jakarta: PT. Indeks
- Arikunto, Suharsmi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2004. *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*. ACFE.
- Aviora, Arie Anggriana. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Sumatera Barat*. Padang : Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah kota Solok untuk Tahun 2009 di Solok*. Melalui www.bpk.com. Diakses tanggal [20 November 2011].
- Bastian, Indra. 2003. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Elangga.
- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta : Gramedia.
- BPKP. 2003. *Kumpulan Modus Operandi Kasus yang Berindikasi Merugikan Keuangan Negara*. Jakarta: Deputi Bidang Investigasi.
- Budiningsih, Asri C. 2004. *Pembelajaran Moral*. Jakarta : Rineka Cipta.

Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.

Ghozali, Iman. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF

Kartono, Kartini. 2002. *Psikologi Sosial untuk Manajemen Perusahaan dan Industri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koletar, Joseph. W. 2003. *Fraud Exposed*. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2009. Melalui www.bpk.com. Diakses tanggal [29 juni 2011].

Nani, Wiliya. 2010. *Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Aparatur Pemerintah Terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Salam, Burhanudin. 2000. *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)*. Jakarta : Rineka Cipta.

Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Sawyer, Laurence. B. 1981. *The Practice of Modern International Auditing*. New York : The Institute of Internal.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Siagian, Sondang. 2004. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta : Rineka Cipta.

Simanjuntak, Ridwan. 2008. *Pengertian dan Pencegahan Kecurangan*. Seri Departemen Akuntansi : FEUI.

Singleton, Tommie, et.al. 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Canada : John Wiley and Sons, Inc.

Sugiyono. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Suhermadi, Bambang. 2006. *Management Fraud*. Melalui <http://internal.dsuc.co.id/managementFraud>. Diakses tanggal [25 Mei 2011].

Tuanakotta, Theodorus. M. 2007. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Seri Departemen Akuntansi : FEUI.

William, Boynton. 1996. *Modern Audit*. Edisi 7 Jilid 1. New York : John Wiley and Sons, Inc.

Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan BUMD di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Melalui www.google.com. Diakses tanggal [25 Januari 2011].

Winardi, J. 2001. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.